

## Representation of Social Injustice in Capernaum: Cultural and Political Critique in Contemporary Arab Cinema

Nabila Ramadhani

UIN Sunan Ampel Surabaya

✉ [ramadhaninabila541@gmail.com](mailto:ramadhaninabila541@gmail.com)

### Abstract:

Film merupakan salah satu media yang paling efektif dalam merepresentasikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Melalui film, identitas suatu kelompok budaya dapat ditampilkan, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih kompleks, seperti interaksi antarbudaya. Film Capernaum karya Nadine Labaki mengisahkan Zain, anak berusia 12 tahun yang menggugat kedua orang tuanya karena membesarkannya dalam keadaan miskin penuh sengsara hingga menjual adik perempuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk representasi ketidakadilan serta menganalisis kritik budaya dan politik yang terkandung dalam film tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis representasi. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan terhadap adegan, dialog, serta alur naratif yang terdapat dalam film. Temuan penelitian menunjukkan bahwa film ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial, di antaranya kemiskinan ekstrem, eksploitasi anak, dan marginalisasi individu yang tidak memiliki identitas hukum. Selain itu, film ini juga mengandung kritik terhadap ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan warganya, serta menyoroti norma-norma sosial yang turut mempertahankan kondisi ketidakadilan tersebut. Dengan mengusung gaya realisme dan melibatkan aktor non-profesional, film ini berhasil menghadirkan pengalaman yang terasa nyata dan menyentuh emosi penonton. Oleh karena itu, Capernaum dapat dipahami sebagai representasi wacana sosial yang kuat dalam sinema Arab kontemporer, yang tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran kritis terhadap persoalan kemanusiaan.

**Keywords:** Sinema Arab; Kritik Politik ; Representasi; Capernaum

### Abstrak:

Film is one of the most effective media for representing a society's culture, traditions, and social values. Through film, the identity of a cultural group can be portrayed, both in aspects of daily life and in more complex contexts, such as intercultural interactions. Nadine Labaki's film \*Capernaum\* tells the story of Zain, a 12-year-old boy who sues his parents for raising him in abject poverty and for selling his younger sister. This study aims to analyze the forms of representation of injustice as well as the cultural and political critiques contained within the film. This study employs a descriptive qualitative research method using a representational analysis approach. Research data were obtained through observations of scenes, dialogues, and narrative plots found in the film. The findings indicate that the film depicts various forms of social injustice, including extreme poverty, child exploitation, and the marginalization of individuals without legal identity. Furthermore, the film critiques the state's failure to ensure the protection and well-being of its citizens and highlights the social norms that perpetuate these conditions of injustice. By adopting a realist style and featuring non-professional actors, the film successfully delivers an experience that feels authentic and resonates emotionally with the audience. Therefore, Capernaum can be understood as a powerful representation of social discourse in contemporary Arab cinema, one that not only reflects reality but also fosters critical awareness of humanitarian issues.

**Kata kunci:** Arab Cinema; Political Criticism; Representation; Capernaum

## PENDAHULUAN

Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana kritik terhadap realitas kehidupan di sebuah wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, sinema Arab kontemporer menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam keberaniannya mengangkat isu-isu sosial yang kompleks dan seringkali sensitif. Dalam konteks sinema Arab kontemporer, banyak sekali film-film yang mengangkat isu sosial seperti kemiskinan, konflik, ketimpangan, dan ketidakadilan. Salah satu film yang terkenal adalah *Capernaum*. Film ini menceritakan tentang konflik dan tragedi dari sudut pandang anak-anak.

Film ini sangat penting karena menyajikan kenyataan pahit masyarakat Suriah yang sering terabaikan. Melalui audio dan visual yang realistis dengan kehidupan nyata, film ini mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi khususnya di Lebanon. Masyarakat Lebanon menghadapi apa yang disebut sebagai salah satu krisis sosial-ekonomi terparah dalam sejarahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, angka bunuh diri meningkat dikarenakan memburuknya kondisi ekonomi. Signifikansi film *Capernaum* tidak hanya terbatas pada konteks Lebanon saja, tetapi juga dalam wacana global. Film ini berhasil menembus berbagai festival internasional dan memperoleh pengakuan luas. Keberhasilan film ini menunjukkan bahwa isu seperti kemiskinan, eksploitasi anak, dan krisis identitas hukum bersifat relevan lintas negara.

Lebih jauh, film ini tidak hanya menyajikan kisah individu, tetapi juga melambangkan struktur sosial yang lebih luas. Kemiskinan yang dialami pada tokoh utama film ini tidak digambarkan karena fenomena individual semata, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial yang tidak adil.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana representasi ketidakadilan sosial dalam film *Capernaum*?
2. Bagaimana film tersebut menyampaikan kritik budaya dan politik?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap film *capernaum* karya Nadine Labaki. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, representasi dan pesan sosial yang terkandung dalam film secara mendalam, bukan untuk mengukur variable secara kuantitatif. Menurut Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sehubungan dengan itu, Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln menegaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi terhadap makna yang dibangun secara sosial. Dalam konteks ini penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana film *Capernaum* karya Nadine Labaki merepresentasikan ketidakadilan sosial serta menyampaikan kritik budaya dan politik melalui

elemen naratif dan visual.

## PEMBAHASAN

### 1. Representasi Ketidakadilan Sosial

Film *Capernaum* karya Nadine Labaki merepresentasikan ketidakadilan sosial melalui berbagai dimensi kehidupan masyarakat marginal di Lebanon. Representasi ini tidak hanya ditampilkan secara naratif, tetapi juga melalui visual yang realistis dan emosional.

Secara naratif, film ini menggunakan sudut pandang anak—tokoh Zain—sebagai strategi penceritaan yang efektif untuk menampilkan ketimpangan sosial secara lebih tajam dan emosional. Perspektif anak memungkinkan penonton melihat dunia tanpa filter ideologis orang dewasa, sehingga berbagai bentuk ketidakadilan tampak lebih absurd dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Stuart Hall bahwa representasi bukan sekadar refleksi realitas, tetapi proses produksi makna yang melibatkan pemilihan sudut pandang tertentu. Dalam konteks ini, pilihan menghadirkan tokoh anak bukanlah kebetulan, melainkan strategi ideologis untuk memperkuat kritik terhadap struktur sosial.

Selain itu, secara visual, film ini mengadopsi gaya realisme yang kuat melalui penggunaan kamera handheld, pencahayaan alami, serta lokasi syuting di lingkungan kumuh yang nyata. Teknik ini menciptakan kesan dokumenter yang membuat penonton merasa seolah-olah menyaksikan realitas secara langsung, bukan sekadar konstruksi fiksi. Kedekatan visual ini memperkuat dimensi emosional film, sehingga penderitaan yang dialami tokoh tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dirasakan secara afektif. Dalam hal ini, visual tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap narasi, melainkan sebagai alat utama dalam membangun makna sosial.

Lebih jauh, representasi ketidakadilan sosial dalam film ini juga bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak ditampilkan sebagai kondisi ekonomi semata, tetapi sebagai fenomena kompleks yang berkaitan dengan eksploitasi, marginalisasi, dan hilangnya identitas hukum. Tokoh utama yang tidak memiliki akta kelahiran menjadi simbol dari individu yang "tidak diakui" oleh negara, sehingga tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai kehilangan "hak untuk memiliki hak" (*the right to have rights*), di mana individu tidak hanya kehilangan hak sipil, tetapi juga eksistensi politiknya.

Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara struktur ekonomi, budaya, dan politik. Kemiskinan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam film tidak dapat dilepaskan dari praktik budaya seperti pernikahan dini dan pola asuh yang tidak memadai, serta dari kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan sosial. Dengan demikian, representasi yang dihadirkan tidak bersifat simplistik, melainkan menunjukkan kompleksitas realitas sosial yang saling terkait.

- **Kemiskinan Ekestrem**

Film ini menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi struktural yang membatasi akses individu terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang dialami tokoh utama bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan juga bentuk ketidakmampuan sistem sosial dalam menyediakan kesejahteraan bagi warganya.

Menurut Amartya Sen, kemiskinan harus dipahami sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*), yaitu ketidakmampuan individu untuk menjalani kehidupan yang layak.<sup>1</sup> Hal ini tercermin dalam kehidupan Zain yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial.

- **Eksplotasi Anak**

Film ini juga menampilkan eksploitasi anak sebagai konsekuensi dari kemiskinan. Anak-anak dipaksa bekerja sejak usia dini dan terlibat dalam aktivitas berisiko untuk bertahan hidup.

Eksplotasi ini menunjukkan adanya pelanggaran hak anak, yang menurut laporan UNICEF merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang masih banyak terjadi di negara berkembang.<sup>2</sup>

### Ketiadaan Identitas Hukum

Salah satu isu penting dalam film ini adalah ketiadaan identitas hukum, seperti akta kelahiran. Tokoh utama tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil.

Menurut UNHCR, identitas hukum merupakan hak dasar yang menentukan akses individu terhadap layanan publik dan perlindungan hukum.<sup>3</sup> Ketiadaan identitas ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi administratifnya.

- **Marginalisasi Sosial**

Film ini juga menggambarkan marginalisasi kelompok rentan, seperti imigran dan masyarakat miskin, yang tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Konsep marginalisasi ini dapat dipahami melalui perspektif Pierre Bourdieu, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial terjadi akibat distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata.<sup>4</sup>

## 2. Kritik Budaya

Film *Capernaum* tidak hanya merepresentasikan realitas sosial secara deskriptif, tetapi juga berfungsi sebagai medium kritik yang secara aktif mempertanyakan dan mendekonstruksi nilai-nilai budaya yang berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan sosial. Dalam hal ini, budaya tidak diposisikan sebagai latar belakang yang netral, melainkan sebagai sistem makna yang hidup dan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang turut membentuk cara individu memahami, menerima, bahkan melegitimasi kondisi ketimpangan yang mereka alami.

Dalam perspektif kajian budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Raymond Williams, budaya merupakan "a whole way of life" yang mencakup praktik, nilai, dan struktur sosial yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, budaya tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga berperan dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Film *Capernaum* secara implisit menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya tertentu—seperti patriarki, norma keluarga, dan persepsi terhadap anak—berkontribusi dalam melanggengkan ketidakadilan sosial, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Salah satu bentuk kritik budaya yang paling menonjol dalam film ini adalah kritik terhadap sistem patriarki. Dalam banyak adegan, perempuan digambarkan berada dalam posisi subordinat, baik dalam keluarga maupun dalam struktur sosial yang lebih luas. Keputusan-keputusan penting dalam keluarga didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan sering kali tidak memiliki otonomi atas tubuh dan masa depannya. Praktik pernikahan dini yang ditampilkan dalam film menjadi contoh konkret bagaimana tubuh perempuan diposisikan sebagai komoditas ekonomi dalam kondisi kemiskinan. Dalam konteks ini, pernikahan tidak lagi dilihat sebagai institusi sosial yang berbasis relasi emosional, melainkan sebagai strategi survival yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi.

Fenomena ini dapat dipahami melalui pemikiran Fatima Mernissi yang menyatakan bahwa patriarki dalam masyarakat tertentu tidak hanya beroperasi melalui struktur formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai yang membatasi peran perempuan. Dengan kata lain, ketidakadilan gender dalam film ini tidak semata-mata disebabkan oleh individu, tetapi oleh sistem budaya yang telah mengakar dan dianggap sebagai sesuatu yang "normal". Film ini, melalui narasinya, berusaha mengganggu normalisasi tersebut dengan menampilkan dampak destruktifnya terhadap kehidupan individu.

Selain itu, film ini juga mengkritik pola asuh dalam keluarga miskin yang secara tidak langsung mereproduksi siklus ketidakadilan sosial. Orang tua dalam film digambarkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, baik secara ekonomi maupun emosional. Namun, alih-alih menyederhanakan kondisi ini sebagai bentuk kelalaian individu, film ini justru menunjukkan bahwa pola asuh tersebut merupakan konsekuensi dari tekanan struktural yang lebih besar. Dalam kondisi kemiskinan ekstrem, pilihan-pilihan yang tersedia bagi keluarga menjadi sangat terbatas, sehingga praktik-praktik yang tampak "tidak ideal" justru menjadi strategi bertahan hidup.

Dalam perspektif kritis, kondisi ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Paulo Freire tentang bagaimana penindasan struktural dapat direproduksi melalui praktik kehidupan sehari-hari. Freire menjelaskan bahwa kelompok yang tertindas sering kali tidak memiliki kesadaran kritis untuk mempertanyakan kondisi mereka, karena mereka telah menginternalisasi nilai-nilai yang menjustifikasi ketidakadilan tersebut. Dalam film *Capernaum*, hal ini terlihat dari bagaimana tokoh-tokohnya tampak menerima kondisi hidup mereka sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, sehingga ketidakadilan sosial menjadi bagian dari "normalitas" kehidupan.

Lebih jauh lagi, film ini juga mengkritik bagaimana masyarakat secara kolektif berperan dalam menormalisasi penderitaan. Lingkungan sosial yang digambarkan dalam film menunjukkan minimnya solidaritas sosial dan rendahnya kepedulian terhadap kelompok rentan. Anak-anak yang bekerja di jalanan, perempuan yang mengalami eksploitasi, serta individu yang tidak memiliki identitas hukum tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya dipertahankan oleh struktur formal seperti negara, tetapi juga oleh praktik sosial sehari-hari yang cenderung mengabaikan penderitaan orang lain.

Dalam konteks ini, kritik budaya yang disampaikan oleh film *Capernaum* dapat dipahami sebagai upaya untuk membongkar ilusi normalitas tersebut. Film ini secara sengaja menampilkan realitas yang keras dan tidak nyaman untuk memaksa penonton keluar dari zona nyaman mereka dan mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dianggap wajar. Dengan demikian, film ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi juga sebagai intervensi kultural yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis.

Selain itu, pendekatan realisme yang digunakan dalam film ini juga berperan penting dalam memperkuat kritik budaya yang disampaikan. Penggunaan aktor non-profesional, lokasi nyata, serta teknik sinematografi yang minimalis menciptakan kesan autentik yang membuat representasi dalam film terasa lebih "nyata". Dalam hal ini, realisme tidak hanya menjadi gaya estetika, tetapi juga strategi ideologis untuk memperkuat pesan kritik. Penonton tidak diberikan jarak untuk melihat film sebagai fiksi, melainkan diajak untuk merasakan bahwa apa yang ditampilkan adalah bagian dari realitas yang benar-benar terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa film *Capernaum* tidak hanya merepresentasikan ketidakadilan sosial, tetapi juga secara aktif mengkritik budaya yang berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan tersebut. Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari patriarki, pola asuh, hingga normalisasi penderitaan dalam masyarakat. Melalui kombinasi antara narasi, visual, dan strategi afektif, film ini berhasil menghadirkan kritik budaya yang tajam sekaligus menggugah kesadaran penonton untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, film ini dapat dipandang sebagai bentuk sinema kritis yang tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga berupaya mengubah cara pandang terhadap realitas tersebut.

- Budaya Patriarki

Film ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki membatasi peran perempuan dan menyebabkan praktik seperti pernikahan dini. Perempuan diposisikan sebagai objek dalam struktur sosial, sehingga rentan terhadap eksploitasi.

Menurut Fatima Mernissi, patriarki merupakan sistem sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki dan memperkuat ketidaksetaraan gender

- Pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam film ditampilkan sebagai solusi ekonomi bagi keluarga miskin, meskipun sebenarnya memperburuk kondisi anak.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana norma budaya dapat melegitimasi praktik yang merugikan kelompok rentan, khususnya anak perempuan.

- Pola Asuh dan Siklus Kemiskinan

Film ini juga mengkritik pola asuh dalam keluarga miskin yang secara tidak langsung mengganggu siklus kemiskinan. Orang tua digambarkan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik secara ekonomi maupun emosional.

Menurut Paulo Freire, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari struktur penindasan yang terus direproduksi dalam masyarakat

### 3. Kritik Politik

Film *Capernaum* karya Nadine Labaki tidak hanya menghadirkan potret kemiskinan dan marginalisasi, tetapi juga menyampaikan kritik politik yang mendalam terhadap relasi antara negara, kekuasaan, dan warga. Berbeda dengan pendekatan kritik yang eksplisit melalui narasi verbal, film ini justru menampilkan kritik politik melalui strategi representasi yang subtil, yakni dengan memperlihatkan **ketidakhadiran negara (state absence)** dalam kehidupan sehari-hari masyarakat marginal di Lebanon. Ketidakhadiran ini bukan sekadar kekosongan, melainkan sebuah bentuk kegagalan struktural yang memiliki implikasi langsung terhadap reproduksi ketidakadilan sosial.

Dalam perspektif teori kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi yang represif dan terlihat, tetapi juga bekerja melalui mekanisme yang lebih halus, termasuk melalui pembiaran (*laissez-faire*) dan ketidakhadiran. Dengan kata lain, negara tidak perlu selalu hadir secara aktif untuk mengontrol, karena ketidakhadirannya pun dapat menjadi bentuk kekuasaan yang efektif dalam mempertahankan struktur ketimpangan. Dalam film *Capernaum*, hal ini terlihat dari bagaimana negara hampir tidak pernah muncul sebagai institusi yang melindungi, melayani, atau bahkan sekadar mengakui keberadaan warganya yang paling rentan.

Salah satu bentuk kritik politik yang paling kuat dalam film ini adalah terkait dengan sistem administrasi kependudukan, khususnya persoalan identitas hukum. Tokoh utama, Zain, tidak memiliki akta kelahiran, sehingga secara administratif ia tidak diakui sebagai warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan fungsi dasarnya dalam mendata dan melindungi warga. Lebih jauh, ketiadaan identitas hukum ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi politik yang serius, karena individu

yang tidak tercatat secara resmi tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, kondisi yang dialami Zain dapat dianalisis melalui pemikiran Hannah Arendt tentang "the right to have rights", yaitu hak fundamental untuk diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Ketika seseorang kehilangan pengakuan ini, maka ia tidak hanya kehilangan hak-hak sipil, tetapi juga kehilangan eksistensinya sebagai bagian dari komunitas politik. Film *Capernaum* secara kuat menggambarkan bagaimana individu-individu yang tidak memiliki identitas hukum berada dalam posisi "liminal", yaitu berada di antara keberadaan dan ketiadaan dalam sistem sosial-politik.

Selain itu, film ini juga mengkritik kegagalan negara dalam menyediakan sistem perlindungan sosial yang memadai. Dalam berbagai adegan, terlihat bahwa anak-anak harus bekerja untuk bertahan hidup, perempuan mengalami eksploitasi, dan kelompok imigran hidup tanpa perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak hadir sebagai *welfare state* yang menjamin kesejahteraan warganya, melainkan sebagai entitas yang abai terhadap penderitaan kelompok marginal. Dengan demikian, ketidakadilan sosial yang terjadi bukan semata-mata akibat kondisi ekonomi, tetapi juga akibat kegagalan kebijakan publik yang tidak berpihak pada kelompok rentan.

Dalam perspektif James C. Scott, kegagalan negara sering kali disebabkan oleh kecenderungan untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks ke dalam kategori-kategori administratif yang kaku. Negara modern, dalam upayanya untuk mengatur masyarakat, sering kali mengabaikan dinamika sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan bahkan memperparah ketimpangan. Dalam film *Capernaum*, kondisi ini tercermin dari bagaimana sistem administrasi tidak mampu menjangkau masyarakat yang hidup di pinggiran, sehingga mereka terlepas dari jangkauan kebijakan negara.

Lebih lanjut, film ini juga dapat dibaca sebagai kritik terhadap sistem ekonomi-politik yang lebih luas, di mana ketidakadilan sosial merupakan konsekuensi dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Meskipun film ini tidak secara eksplisit menyebutkan sistem ekonomi tertentu, namun representasi yang ditampilkan menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak. Dalam konteks ini, negara tampak gagal berfungsi sebagai mediator yang adil, dan justru membiarkan ketimpangan tersebut terus berlangsung.

Kritik politik dalam film ini juga diperkuat melalui penggunaan strategi naratif yang menempatkan individu sebagai korban dari sistem yang lebih besar. Tokoh-tokoh dalam film tidak digambarkan sebagai agen yang sepenuhnya bebas, melainkan sebagai subjek yang terperangkap dalam struktur sosial yang membatasi pilihan mereka. Dengan demikian, film ini menolak narasi individualistik yang menyalahkan individu atas kondisi mereka, dan sebaliknya menekankan bahwa ketidakadilan sosial adalah hasil dari sistem yang tidak adil.

Selain itu, adegan pengadilan dalam film ini dapat dibaca sebagai metafora politik yang kuat. Gugatan Zain terhadap orang tuanya tidak hanya dapat dipahami sebagai konflik keluarga, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang telah gagal menjamin kehidupan yang layak. Pengadilan dalam film ini menjadi ruang di mana ketidakadilan sosial dipertanyakan secara terbuka, sekaligus menunjukkan keterbatasan sistem hukum dalam memberikan keadilan yang substantif. Dalam hal ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang tidak mampu menyelesaikan akar masalah.

Dengan demikian, kritik politik yang disampaikan dalam film *Capernaum* bersifat multidimensional, mencakup kritik terhadap negara, birokrasi, sistem hukum, dan kebijakan publik. Film ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai struktur kekuasaan. Melalui representasi yang kuat dan pendekatan realisme yang mendalam, film ini berhasil mengungkap bagaimana ketidakhadiran negara, kegagalan kebijakan, dan ketimpangan struktural berkontribusi terhadap penderitaan masyarakat marginal.

Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa *Capernaum* tidak hanya berfungsi sebagai karya sinematik, tetapi juga sebagai bentuk kritik politik yang tajam terhadap sistem sosial yang tidak adil. Film ini mengajak penonton untuk tidak hanya berempati terhadap penderitaan individu, tetapi juga untuk memahami dan mempertanyakan struktur kekuasaan yang melanggengkan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, film ini memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis dan mendorong refleksi terhadap peran negara dalam menciptakan keadilan sosial.

- **Kegagalan Negara**

Film ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warga, khususnya kelompok marginal. Negara tidak mampu menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Menurut James C. Scott, kegagalan negara sering kali terjadi karena ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat.

- Sistem Birokrasi yang Lemah
- Film *Capernaum* menampilkan lemahnya sistem birokrasi negara, terutama dalam administrasi kependudukan, sebagai faktor penting dalam reproduksi ketidakadilan sosial. Ketiadaan identitas hukum pada tokoh utama menunjukkan bahwa individu yang tidak tercatat secara administratif menjadi "tidak ada" dalam sistem negara, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dalam perspektif Max Weber, birokrasi idealnya berfungsi secara rasional dan efisien, namun dalam praktiknya dapat menjadi struktur kaku yang justru membatasi individu. Hal ini diperkuat oleh pandangan James C. Scott bahwa negara modern cenderung menyederhanakan realitas sosial, sehingga kelompok yang tidak sesuai dengan kategori administratif menjadi tidak terbaca dan akhirnya terpinggirkan.

Akibatnya, birokrasi tidak hanya gagal menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme eksklusi sosial. Dalam konteks ini, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault, di mana ketidakhadiran negara dalam melayani warga justru menjadi cara mempertahankan ketimpangan.

Dengan demikian, film ini mengkritik bahwa kelemahan birokrasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan struktural yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ketidakadilan sosial.

- Minimnya Perlindungan Sosial

Film ini juga menyoroti minimnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan imigran. Negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai institusi yang abai terhadap penderitaan masyarakat.

Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan negara tidak selalu bersifat represif, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk ketidakhadiran (absence of power)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa film *Capernaum* karya Nadine Labaki merepresentasikan ketidakadilan sosial secara kuat dan multidimensional melalui narasi, visual, dan strategi afektif. Ketidakadilan

tersebut tampak dalam bentuk kemiskinan ekstrem, eksploitasi anak, ketiadaan identitas hukum, serta marginalisasi kelompok rentan di Lebanon. Representasi ini tidak bersifat netral, melainkan mengarahkan penonton untuk memahami bahwa penderitaan yang dialami tokoh bukan sekadar masalah individual, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak adil.

Selain itu, film ini mengandung kritik budaya yang tajam, terutama terhadap praktik patriarki, pernikahan dini, serta pola asuh yang berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan. Budaya dalam hal ini tidak hanya menjadi latar, tetapi berfungsi sebagai mekanisme yang menormalisasi dan mempertahankan ketidakadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kritik politik dalam film ini menyoroti kegagalan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya, baik dalam hal administrasi, perlindungan sosial, maupun penyediaan layanan publik. Ketidakhadiran negara serta lemahnya sistem birokrasi menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial juga merupakan konsekuensi dari struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada kelompok marginal.

Dengan demikian, *Capernaum* tidak hanya berfungsi sebagai karya sinematik, tetapi juga sebagai medium kritik sosial yang mampu membangun kesadaran kritis penonton terhadap realitas ketidakadilan. Film ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial memerlukan perubahan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga budaya dan politik secara menyeluruh.

## REFERENSI

- Ahmadi, A., Yusuf, K., Fazliyaton, S., Yani, M. T., & Hariyati, N. R. (2025). The Transformation of Islamic Identity Behind The Screen: Indonesian Horror Films, 1980-2020. *Journal of Indonesian Islam*, 19(1), 188-213.
- Ahmadi, A., Nawawi, M. A. A. M., Yusuf, K., Hadi, S., Effendy, M. H., & Yani, M. T. (2025). Framing the Faithful: Islam, Gender, and National Identity on the Indonesian Screen. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(2), 690-717.
- Ahmadi, A., Yulianto, B., Ahmad, H., Yusuf, K., & Hariyati, N. R. (2025). Law and Identity: Cinematic Depictions of Muslim Women in Indonesia. *Ulumuna*, 29(2), 1014-1038.